

**INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK OLEH
DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA
(DPW PARTAI PERINDO) PROVINSI RIAU**

Fajar Rizqy Matra Marta
Email : fajar3825@gmail.com
Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Sebagai partai politik yang baru berdiri ini merupakan loncatan yang cukup berarti bagi partai PERINDO khususnya di Provinsi Riau, sehingga membuat penulis tertarik meneliti bagaimana partai politik baru ini membangun institusionalisasinya di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Riau. Selain itu, penulis juga ingin meneliti faktor apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai PERINDO Provinsi Riau dalam melakukan institusionalisasinya. masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah institusionalisasi partai politik oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau?. Faktor apa saja yang menjadi hambatan yang dialami oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau dalam melakukan institusionalisasi partai politik?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui institusionalisasi partai politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan yang dialami oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau dalam melakukan institusionalisasi partai politik. Metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di DPW Partai PERINDO Provinsi Riau. Sumber data primer melalui wawancara serta sumber data sekunder. Teknik analisa data dilaksanakan dengan analisis deskriptif kualitatif.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau sebagai bagian dari partai PERINDO dalam beraktifitas menjalankan fungsi partai politik tidak diperbolehkan untuk keluar serta selalu berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan lainnya yang berlaku di partai PERINDO. Identitas nilai yang dikedepankan oleh adalah penguatan bangsa Indonesia di bidang ekonomi kerakyatan. DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau belum ada melaksanakan pengikatan hubungan dengan pihak manapun dalam pembuatan keputusan. Sedangkan mengenai pembiayaan Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau masih bersifat swadaya. DPW Partai PERINDO Provinsi Riau dalam membuat pengetahuan atau citra positif ditengah-tengah masyarakat masih bergantung dengan apa yang dilakukan oleh DPP Partai PERINDO. Faktor Penghambat Institusionalisasi Partai Politik DPW Partai PERINDO Provinsi Riau : pendanaan, sumber daya manusia, partai politik baru.

Kata kunci : institusionalisasi, partai politik

INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PARTIES BY DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPW PARTAI PERINDO) RIAU PROVINCE

Fajar Rizqy Matra Marta
Email : fajar3825@gmail.com
Mentor : Adlin, S.Sos, M.Si

Government Science Of The Faculty of Socical and Political Science
University of Riau

Bina Widya Campus, H.R. Soebrantas street km.12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

As a newly established political party, this is a significant step for PERINDO's party, especially in Riau province, so that the writer is interested to examine how this new political party is establishing its institutionalization at the level of Riau Province Board. In addition, the authors also want to examine what factors become obstacles faced by Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PERINDO Riau Province Party in conducting institutionalization. The research problem can be formulated as follows: How is the institutionalization of political party by the Dewan Pimpinan Wilayah of the Persatuan Indonesia Party (DPW PERINDO Party) Riau Province ?. What factors are the obstacles experienced by the Dewan Pimpinan Wilayah of the Persatuan Indonesia Party (DPW PERINDO Party) Riau Province in conducting the institutionalization of the political party ?. The purpose of this research is: To know the institutionalization political party conducted by the Dewan Pimpinan Wilayah of the Persatuan Indonesia Party (DPW PERINDO Party) Riau Province. To know what factors become obstacles experienced by the Dewan Pimpinan Wilayah of the Persatuan Indonesia Party (DPW PERINDO Party) Riau Province in conducting institutionalization of the political party. Qualitative research methods. Location of research in DPW PERINDO Riau Province Party. Primary data sources through interviews as well as secondary data sources. Data analysis technique is conducted by qualitative descriptive analysis.

The Dewan Pimpinan Wilayah of the Persatuan Indonesia Party (DPW PERINDO Party) Riau Province as part of the PERINDO party in the activity of carrying out the functions of political parties is not allowed to leave and always guided by the Statutes / Bylaws and other rules applicable in the party PERINDO. The identity of the values put forward by is the strengthening of the Indonesian nation in the field of economic populist. DPW PERINDO Party of Riau Province has not implemented any connection binding with any party in decision making. While regarding the financing of the Dewan Pimpinan Wilayah of the Persatuan Indonesia Party (DPW PERINDO Party) Riau Province is still self-supporting. DPW PERINDO Riau Province Party in making the knowledge or positive image in the middle of society still depends on what is done by DPP PERINDO party. Factors inhibiting the Institutionalization of Political Parties DPW PERINDO Party Riau Province: funding, human resources, new political parties.

Keywords: institutionalization, political party

A. Latar Belakang

Partai PERINDO sebagai partai politik baru telah memperlihatkan perkembangannya. Salah satunya adalah dari segi anggota, dimana anggotanya hadir di seluruh wilayah Indonesia. Anggota partai PERINDO kini sudah mencapai seluruh provinsi, kabupaten atau kota, dan bahkan sudah menyentuh wilayah kecamatan sampai desa.

Provinsi Riau adalah bagian dari provinsi di Indonesia yang tidak terlepas dari eksistensi partai PERINDO. Dari pengamatan data di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) partai PERINDO Provinsi Riau tercatat dari 100 ribu Kartu Tanda Anggota (KTA) yang disebar oleh pengurus saat sosialisasi pertama, terdapat 27 ribu KTA yang telah dikembalikan ke pengurus, artinya awal berdiri partai PERINDO di Provinsi Riau memiliki 27 ribu anggota. Adapun semua pemilik KTA partai PERINDO adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih. Dari sejumlah anggota tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah.

Secara struktural, partai PERINDO selain telah melakukan pembentukan kepengurusan di tingkat DPW partai PERINDO Provinsi Riau, juga telah membentuk kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Daerah (DPD) di 12 kabupaten/kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tiap kecamatan, dan Dewan Pengurus Ranting (DPRt) di tiap desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Riau.

Sebagai partai politik yang baru berdiri ini merupakan loncatan yang cukup berarti bagi partai PERINDO khususnya di Provinsi Riau, sehingga membuat penulis tertarik meneliti bagaimana partai politik baru ini membangun institusionalisasinya

di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi Riau. Selain itu, penulis juga ingin meneliti faktor apa saja yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai PERINDO Provinsi Riau dalam melakukan institusionalisasinya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“Institusionalisasi Partai Politik Oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau”**.

B. Kerangka Teoritis

1. Intitusionalisasi Partai Politik

Partai politik merupakan wadah atau sarana warga negara untuk ikut serta dalam pengelolaan negara, dimana didalamnya terdapat himpunan orang-orang yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dalam bersaing untuk memperoleh jabatan politik dan pemerintahan, yang nantinya tetap memperjuangkan kepentingan publik. Dalam langkahnya, partai politik senantiasa hadir ditengah masyarakat pada waktu-waktu pemilu atau melakukan aktivitasnya menjelang pemilu saja, setelah itu masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan oleh partai politik, ini merupakan salah satu kelemahan dari partai politik. Intitusionalisasi partai politik tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena terdapat kelemahan-kelemahan internal dan eksternal partai.

pelebagaan partai politik menurut Vicky Randall dan Lars Svasan merupakan proses pemantapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam mempolakan sikap atau budaya (*the process by wich the party become established in terms of both*

integrated patterns on behaviour and of attitude and culture).

(1) derajat kesisteman (*systemnes*) suatu partai politik sebagai hasilpersilangan aspek internal dengan struktural.

Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisrne yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga partai politik. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut :

- (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah;
- (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai politik : seorang pemimpin partai politik yang disegani ataukah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan;
- (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai politik ataukah partai politik secara keseluruhan;dan
- (d) bagaimana partai politik memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga).

Lebih tegas lagi kesisteman ini merujuk pada bagian internal partai politik yang berfokus pada srukturalnya, dimana mengenai pengembangan peningkatan ruang lingkup partai politik, kepadatan dan keteraturan interaksi yang berstruktur, yang secara formal kesemuanya ini di atur melalui aturan partai politik yang dikemas oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

(2) derajat identitas nilai (*valueinfusion*) suatu partai politik sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.

Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai poilitik berdasarkan ideologi atau platform partai politik, berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Karena itu derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan :

- (a) hubungan partai politik dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan
- (b) pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai politik dengan anggota cenderung bersifat

instrumentalis (anggota selalu mengharapkan *tangible resources* berupa materi dari partai politik) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai politik bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai politik).

Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

- (3) derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) suatu partai politik sebagai hasil persilangan aspek eksternal dan struktural.

Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai politik dengan aktor luar partai politik baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa atau pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat):

- (a) apakah partai politik tergantung kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependen*), dan
- (b) apakah keputusan partai politik ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai politik.
- (4) derajat pengetahuan atau citra publik (*reification*) suatu partai politik sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Reifikasi menunjukkan derajat pengetahuan publik tentang partai politik yang merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai politik tersebut. ([institusionalisasi-partai-sebuah-proses.html](#)).

2. Rekrutmen Politik

Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.

Suharno menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik. (Inu Kencana, 2009:58). Ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu :

- a. rekrutmen terbuka
semua warga negara yang memenuhi syarat tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki posisi-

posisi yang ada dalam lembaga negara/pemerintah. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya cukup tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat atau yang dikenal sebagai platform politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya.

- b. rekrutmen tertutup kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Ujian oleh masyarakat terhadap kualitas serta integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang dilakukan, kecuali oleh sekelompok kecil elite itu sendiri.

Anggota merupakan basis sebuah partai politik. Semakin banyak anggota semakin kuat partai politiknya. Semakin banyak anggota partai politik yang aktif dan semakin banyak yang bersedia untuk bekerja secara sukarela untuk partai politik, maka semakin kuatlah partai politik tersebut. Melihat kenyataan diatas, maka partai politik harus berusaha untuk merekrut sebanyak mungkin anggotanya, selama mereka setuju dengan ideologi dan nilai-nilai dasarnya, serta menjaga agar yang sudah menjadi anggota tetap puas sebagai anggota partai politik.

C. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis. Sesuai dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari lapangan, teknik analisis yang digunakan adalah

analisis deksriptif. Melalui teknik ini, akan digambarkan seluruh data atau fakta yang diperoleh dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian dan penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

D. Hasil Penelitian

1. **Institusionalisasi Partai Politik Oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau**

a. **Derajat Kesisteman (*systemnes*) Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau**

Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau sebagai bagian dari partai PERINDO dalam beraktifitas menjalankan fungsi partai politik tidak diperbolehkan untuk keluar serta selalu berpedoman pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan lainnya yang berlaku di partai PERINDO.

b. **Derajat Identitas Nilai (*valueinfusion*) Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau**

Identitas nilai yang dikedepankan oleh partai PERINDO adalah penguatan bangsa Indonesia di bidang ekonomi kerakyatan. Partai PERINDO mempunyai alasan bahwasannya ekonomi kerakyatan akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

c. **Derajat Otonomi Suatu Partai Politik Dalam Pembuatan Keputusan (*decisional autonomy*) Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau**

Partai PERINDO khususnya Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau belum ada melaksanakan

pengikatan hubungan dengan pihak manapun dalam pembuatan keputusan. Sedangkan mengenai pembiayaan dalam menjalankan roda partai PERINDO di Provinsi Riau, Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau masih bersifat swadaya.

d. Derajat Pengetahuan atau Citra Publik (*reification*) Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau

Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau dalam membuat pengetahuan atau citra positif ditengah-tengah masyarakat masih bergantung dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Partai PERINDO). DPP partai PERINDO melakukan sosialisasi secara intens di media, selain itu juga melalui pelaksanaan program-program kegiatan yang langsung menyentuh ke masyarakat.

2. Faktor Penghambat Institusionalisasi Partai Politik Oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau

a. Pendanaan

Dalam memenuhi kebutuhan dana Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau berasal dari sumbangan internal partai PERINDO baik itu dari anggota, pengurus Dewan Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau, maupun dari Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Partai PERINDO). Dalam mengatasi hambatan dana ini Bapak Ami Septari selaku ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau harus memutar otak, sistem gali lubang tutup lubang juga diterapkan.

b. Sumber daya manusia

Partai PERINDO khususnya di Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau baik yang sebagai anggota maupun pengurus terdiri dari individu-individu yang tidak semuanya paham dan mengerti tentang kerja-kerja partai politik. Bagi pengurus maupun anggota yang mengerti dan paham harus bekerja ekstra memberi pengertian dan pemahaman.

c. Partai politik baru

Partai PERINDO khususnya Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau diharuskan melakukan aktifitas yang lebih dibandingkan dengan partai politik lain seperti : merekrut anggota, mencari simpati, memberi pemahaman dan pengertian kepada yang belum mengerti dan paham tentang partai politik bahkan tentang politik itu sendiri.

E. Saran

Saran yang penulis bisa sampaikan dalam penelitian Institusionalisasi Partai Politik Oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Partai PERINDO khususnya Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau senantiasa berpedoman terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai PERINDO.
2. Lebih intens melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat
3. Merekrut anggota ataupun menjadikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Indonesia (DPW Partai PERINDO) Provinsi Riau para individu yang bisa dijadikan donatur guna mengatasi permasalahan pendanaan.
4. Melakukan pelatihan-pelatihan guna memberi pemahaman yang mendalam mengenai partai

PERINDO, partai politik, bahkan politik itu sendiri.

5. Agar lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan sosialisasi serta tidak sepenuhnya bergantung kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Indonesia (DPP Partai PERINDO).

F. Daftar Pustaka

Buku teks

Budiardjo, Miriam, *Pengantar Ilmu Politik*. 2008. Gramedia: Jakarta.

Cangara, Hafied, Prof. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. 2011. Raja Grafindo: Jakarta.

Efriza. *Political Explore-Sebuah kajian Ilmu Politik*. 2012. Alfabeta: Bandung.

Prihatmoko, Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. 2005. Pustaka Pelajar: Semarang

Mainwaring, Scott dan Mariano Torcal. *Party System Institutionalization and Party System Theory After the Third Wave of Democratization* dalam Katz, Richard.S dan William Crotty (editor). *Hand Book of Party Politics*. (London: Sage, 2006).

Rudy, T May, 2003. *Pengantar Ilmu Politik Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. 2003. Refika Aditama: Bandung.

Syafie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Politik*. 2009. Pustaka Reka Cipta: Bandung

Surbakti, Ramlan., *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2002)

Undang-undang

Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Partai Politik

Sumber lain

institusionalisasi-partai-sebuah-proses.html

<http://www.radarbangka.co.id>

<http://riausemesta.com/news/detail/925/ah-mi-septari-:--dari-35-provinsi-perindo-riau-peringkat-5--anggota-terbanyak>.